

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH SATPAM KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)

Oleh

Eriyani Erman

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana sering kali masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks konkret peristiwa serta nilai keadilan substantif. Kondisi tersebut tampak dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh satuan pengamanan (satpam) dalam situasi pembelaan terpaksa sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgl. Satpam sebagai petugas keamanan memiliki tugas dan kewenangan terbatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, sehingga tindakan yang dilakukan dalam menghadapi ancaman nyata seharusnya dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan situasi keterpaksaan yang dihadapi. Permasalahan yang dibahas yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Data dalam penelitian ini di dapat dan diolah menggunakan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satpam terjadi dalam situasi adanya serangan atau ancaman nyata yang bersifat melawan hukum dan membahayakan keselamatan diri maupun lingkungan kerja, sehingga secara normatif memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan

Eriyani Erman

tugas pengamanan dan bukan didorong oleh niat jahat atau kehendak untuk melukai, melainkan sebagai respons spontan terhadap keadaan yang mendesak dan tidak memberikan alternatif lain yang lebih ringan. Namun dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan kekerasan secara formil tanpa mengkaji secara mendalam unsur proporsionalitas, situasi keterpaksaan, serta kondisi psikis pelaku pada saat peristiwa terjadi. Akibatnya, alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa tidak dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu penegak hukum agar dapat memahami dan menerapkan unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP secara lebih menyeluruh, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur hukum secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami penyelesaian konflik dengan cara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat serta sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai dan tertib di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Satpam, Pembelaan Terpaksa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE BY SECURITY UNITS FORCED DEFENCE (Study Decision Number 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)

By

Eriyani Erman

Criminal responsibility is a basic principle in criminal law which emphasizes that punishment can only be imposed on a person if his actions meet the elements of an unlawful act and a mistake, and there is no justification or excuse. However, in law enforcement practice, the application of criminal responsibility is often still formalistic and does not fully take into account the concrete context of events and the value of substantive justice. This condition appears in cases of criminal acts of violence committed by security units (security guards) in situations of forced defense as reflected in Decision Number 143/Pid.B/2022/PN Mgl. Security guards as security officers have limited duties and authority to maintain security and order in their work environment, so that actions taken in the face of real threats should be assessed proportionally by considering the duress situation they face. This research aims to analyze criminal liability for criminal acts of violence by security guards due to forced defense and assess its conformity with the principles of substantive justice.

The research method used is normative juridical and empirical juridical which aims to analyze criminal responsibility for violent crimes by security guards due to forced defense and to assess its suitability with the principles of substantive justice. The data in this research can be and is processed using literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, to be able to describe the problems that occur.

The results of the study indicate that based on the facts revealed in court, the violent acts committed by the security guard occurred in a situation of an unlawful attack or real threat that endangered personal safety and the work environment, thus normatively fulfilling the element of forced defense as stipulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, these actions were carried out in the context of carrying out security duties and were not driven by malicious intent or the desire to harm, but rather as a spontaneous response to urgent circumstances

Eriyani Erman

and did not provide any other, lighter alternative. However, in his legal considerations, the judge focused more on fulfilling the formal element of violent acts without thoroughly examining the elements of proportionality, the situation of compulsion, and the psychological condition of the perpetrator at the time of the incident. As a result, the justification in the form of forced defense was not used as a basis for eliminating criminal liability, so the defendant was still sentenced to prison. Thus, this study examines criminal liability for violent crimes committed by security guards due to forced defense and assesses its compliance with the principles of substantive justice.

The author's suggestion is that law enforcement officers should understand and apply the elements of forced defense as stipulated in Article 49 of the Criminal Code more comprehensively, while still paying attention to the value of substantive justice in the law enforcement process. This is important so that law enforcement does not only focus on fulfilling the formal legal elements, but also is able to realize benefits, legal certainty, and justice. Furthermore, the public is expected to understand conflict resolution in a way that prioritizes the values of justice that apply in society and is in accordance with legal provisions, so that a peaceful and orderly community life can be created in Indonesia.

Keywords: Criminal Liability, Security Guard Violence, Forced Defense